

LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197605201995111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	6
D. Sumber Daya Organisasi.....	7
1. Kepegawaian	7
2. Sarana dan Prasarana	11
3. Anggaran	12
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	13
F. Landasan Hukum	15
G. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	18
1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	19
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	20
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	21
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	37
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	37
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	41
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	47
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional,	

standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	49
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	49
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	58
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	65
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	66
D. Inovasi Tahun 2024.....	73
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	74
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Rencana Aksi Tahun 2025	79
LAMPIRAN	83
A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah	84
B. Matriks Renstra terakhir.....	88
C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya	95
D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir	100
E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya.....	107
F. Pengukuran Kinerja	113
G. Pohon Kinerja	120
H. Crosscutting	120
I. Cascading	121
J. Lain-lain yang dianggap perlu.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

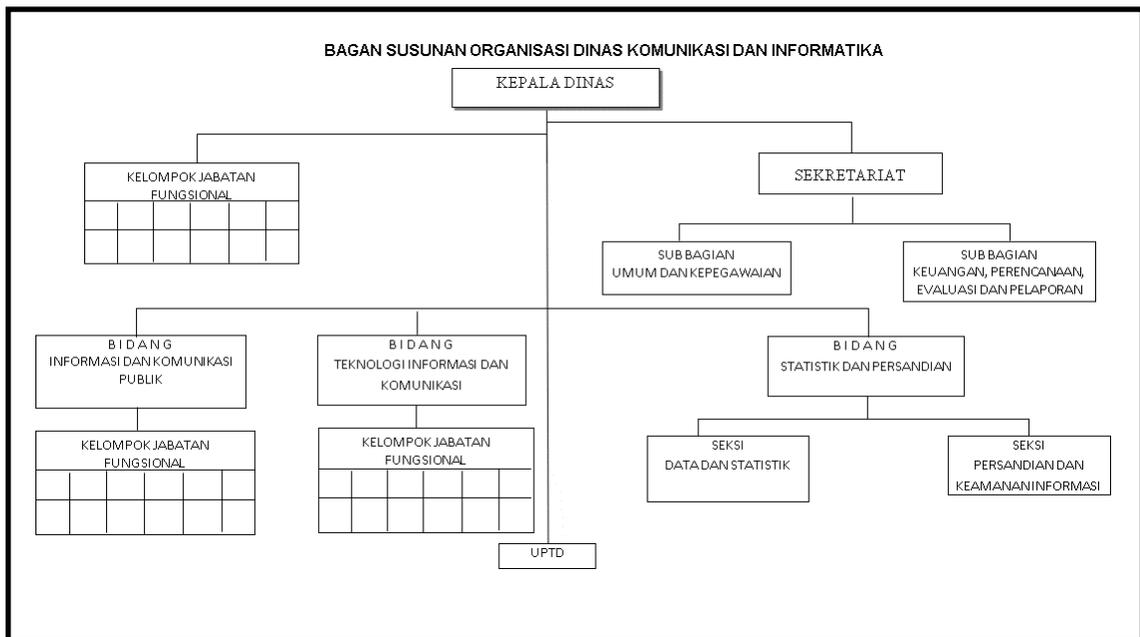
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - a. Seksi Data Statistik.
 - b. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

6. UPTD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada pasal 4 Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. Pelaksanaan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh pegawai sebanyak 40 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai.

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
	Fasilitator Pemerintahan	1	0	1
	Pengolah Data Dan Informasi	3	0	3
	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	1
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan	1	1	0

	Kepegawaian			
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
	Fasilitator Pemerintahan	1	0	1
	Pengolah Data Dan Informasi	3	0	3
	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
	Operator Layanan Operasional	5	0	5
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	5	1	4
	Penata Layanan Operasional	3	0	3
	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	2
	Jurnalis	5	0	5
	Pengelola Siaran	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
	Operator Layanan Operasional	2	0	2
	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	3	2	1
6	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	2	0	2
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	6
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
	Pengolah Data Dan Informasi	7	2	5
	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
	Operator Layanan Operasional	3	0	3
	JF Pranata Komputer Ahli Muda	2	2	0
7	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	1	0
	Kepala Seksi Data Statistik	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3
	Penata Layanan Operasional	2	0	2
	Pengelola Layanan Operasional	2	0	2
	Pengolah Data Dan Informasi	3	1	2
8	Jabatan Fungsional Tertentu :			
	JF Pranata Komputer Pelaksana	9	7	2

JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	6	0	6
JF Pranata Komputer Penyelia	4	0	4
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	9	9	0
JF Pranata Komputer Ahli Muda	2	0	2
JF Pranata Komputer Ahli Madya	1	0	1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	2	0	2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	2	0	2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	2	0	2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	5	1	4
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	3	0	3
JF Sandiman Pelaksana	1	0	1
JF Sandiman Pelaksana Lanjutan	1	0	1
JF Sandiman Penyelia	1	0	1
JF Statistisi Ahli Pertama	1	1	0
JF Statistisi Ahli Muda	1	0	1
JF Statistisi Ahli Madya	1	0	1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1	0	1
JF Menggala Informatika Ahli Pertama	3	0	3
JF Menggala Informatika Ahli Muda	2	0	2
JF Menggala Informatika Ahli Madya	1	0	1
JF Sandiman Ahli Pertama	1	0	1
JF Sandiman Ahli Muda	1	0	1
JF Sandiman Ahli Madya	1	0	1
JF Perencana Ahli Pertama	1	0	1
JF Perencana Ahli Muda	1	0	1
JF Teknisi Siaran Ahli Pertama	1	0	1
JF Teknisi Siaran Ahli Muda	1	0	1
JF Asisten Teknisi Siaran Pelaksana	1	0	1
JF Asiparis Terampil	1	0	1
JF Asiparis Mahir	1	0	1
Jumlah	163	40	123

Kebutuhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 163 orang dan baru terpenuhi sebanyak 40 orang., sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 123 orang sebagaimana dirinci pada tabel 1.1.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
	PNS	
1	Pembina Utama / IV-d	0
2	Pembina Utama Muda / IV-c	1
3	Pembina Tk.I / IV-b	1
4	Pembina / IV-a	2
5	Penata Tk.I / III-d	8
6	Penata / III-c	2
7	Penata Muda Tk.I / III-b	2
8	Penata Muda / III-a	7
9	Pengatur Tk.I / II-d	2
10	Pengatur / II-c	6
11	Pengatur Muda / II-b	
12	Pengatur Muda Tk.I / IIa	
	Jumlah PNS	31
	PPPK	
1	Kelas 9	8
2	Kelas 7	1
	Jumlah PPPK	9
	Jumlah PNS dan PPPK (ASN)	40

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	Strata 3	

2	Strata 2	3
3	Strata 1/Sederajad	15
4	Diploma	10
5	SMA/Sederajad	3
6	SMP/Sederajad	0
7	SD/Sederajad	0
	Jumlah PNS	31
	PPPK	
1	Strata 3	
2	Strata 2	
3	Strata 1/Sederajad	8
4	Diploma	1
5	SMA/Sederajad	
6	SMP/Sederajad	
7	SD/Sederajad	
	Jumlah PPPK	9
	Jumlah PNS+PPPK (ASN)	40

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
	PNS	
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	14
	Jumlah PNS	31
	PPPK	
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	1
	Jumlah PPPK	9
	Jumlah PNS + PPPK (ASN)	40

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	12.528.425.658	721.017.670	879.726.200	12.369.717.156
3.	Gedung dan Bangunan	270.752.000	-	-	270.752.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.000.000	-	-	110.000.000
5.	Aset tetap lainnya	-	-	-	-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	12.909.177.686	721.017.670	879.726.200	12.750.469.156

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.295.074.757 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang Urusan	Kepuasan ASN Dinas	skor	80	5.522.171.513

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi	%	90	1.020.900.866
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan	%	50	2.398.298.870
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang di olah dan disajikan	%	86	245.703.508
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi	%	60	108.000.000

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai dan belum terbentuknya metadata statistik sektoral;
3. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
 - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian.
 - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis.
 - Belum adanya kolaborasi yang harmonis antar Perangkat daerah dan sinergitas peraturan dalam manajemen SPBE.
 - Pengembangan aplikasi yang belum berdasarkan proses bisnis;
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi , khususnya website pemerintah daerah:

5. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan;

6. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

Perumusan Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik : Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian, belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis, belum adanya kolaborasi yang harmonis antar Perangkat daerah dan sinergitas peraturan dalam manajemen SPBE;
3. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan pohon kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 Tanggal 1 Februari 2024.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan ke-5 RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran ke-3 RPD: Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Strategi RPD: Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
Arah Kebijakan RPD: Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Tujuan OPD: Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran 1 OPD: Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City

Sasaran 2 OPD: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

- Indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat

Sasaran 3 OPD: Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor

- Indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas

Sasaran 4 OPD: Meningkatnya kualitas keamanan informasi

- Indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi

Sasaran 5 OPD: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

- Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan diharapkan dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran di atas, Tujuan yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Tujuan RPD ke-5 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung Sasaran RPD ke-3 yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik dengan Strategi meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan Arah Kebijakan pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun Renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,01	3,1	3,2

	1.1	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	%	80	81	82
	1.2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	90	92	95
	1.3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	%	86	87	88
	1.4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	44	60	65
	1.5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	89,50	89,60	89,70
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	84,7	85,1	85,8

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN ke-5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
SASARAN ke-3 : Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government
	2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Informasi dan pengelolaan komunikasi publik	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif dalam bentuk penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi
	3. Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data	Mengoptimalkan Pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	4. Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Kab. Magetan	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah

	5. Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kinerja perencanaan dan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Optimalisasi kinerja perencanaan dan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan: Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	%	Penyelenggaraan Tata kelola SPBE dan Smart City untk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan Tata kelola SPBE dan Smart City}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100\%$	Laporan Bidang TIK
Sasaran 2: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	2.1	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	Informasi yang dipublikasikan dan telah tersampaikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi yang disampaikan}}{\text{Jumlah masyarakat yang disurvei}} \times 100\%$	Laporan hasil survey di medsos Bidang IKP
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas	3.1	Persentase Data Statistik sektoral	%	Data Statistik Sektoral yang	$\frac{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral yang berkualitas}}{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$	Laporan Bidang SDP

Data Statistik Sektoral		yang berkualitas		dimiliki Perangkat Daerah produsen data dan mendapatkan verifikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah	
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	Perangkat Daerah yang telah menjalankan keamanan informasi sesuai standar SMKI	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100\%$	Laporan Bidang SDP

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,09	
		1.1	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	%	80
		1.2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	90
		1.3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	%	86

	1.4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	44
	1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	89,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	84,7

Sumber: Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja)

Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 3 Januari 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	1.1	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	%	80
		1.2	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	90
2.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	2.1	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	%	93
3.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	%	44
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	%	85

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kepuasan ASN Dinas	80 Skor	5.308.342.011

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	35.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	91%	3.352.605.205
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Orang	35.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	345.736.806
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	1.355.000.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	16 Unit	185.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi	90%	812.260.716

		Publik Dalam Desiminasi Informasi		
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media	1200 Berita	812.260.716
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan	50%	1.848.298.970
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	15 OPD	1.230.919.183
3.2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE	1 Dokumen	617.379.787
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang di olah dan disajikan	86%	245.703.508
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	3 Dokumen	245.703.508
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi	60%	108.000.000
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	46 OPD	108.000.000

		Daerah		
--	--	--------	--	--

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 2 November 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	%	80
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2.1	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	90
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	3.1	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	%	86
4.	Meningkatnya keamanan	4.1	Persentase Perangkat	%	44

	informasi daerah		Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi		
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	5.1	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	89,50
		5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	84,7

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika	80	5.522.171.513
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	35.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	91%	3.687.384.407

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Orang	35.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	450.311.106
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	1.046.152.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	16 Unit	268.324.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi	90%	1.020.900.866
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media	1200 Berita	1.020.900.866
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan	50%	2.398.298.870
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	15 OPD	1.230.919.183
3.2	Pengelolaan E-government di	Penyusunan	1 Dokumen	1.167.379.687

	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Tata Kelola SPBE		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang di olah dan disajikan	86%	245.703.508
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	3 Dokumen	245.703.508
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi	60%	108.000.000
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	46 OPD	108.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan	Cukup Berhasil

		kurang dari tujuh puluh lima persen	
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	80 %	73,92%	92,4	Berhasil	Bidang TIK Dinas Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90 %	74,37 %	82,63	Berhasil	Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	86 %	96,3 %	111,98	Sangat Berhasil	Bidang SDP Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44 %	47,83 %	108,7	Sangat Berhasil	Bidang SDP Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50	89,41	99,9	Berhasil	LHE AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	84,7	87,62	103,45	Sangat Berhasil	E SKM Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian penjelasan tabel:

1. Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City

Tata kelola SPBE mengacu pada pengelolaan dan pengaturan sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tata kelola SPBE dan smart city saling terkait dalam upaya meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan layanan publik serta infrastruktur kota / kab

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan, prosedur, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, inovasi dan manajemen data. Capaian Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City Tahun 2023 sebesar 92,4 % termasuk dalam kategori Berhasil karena telah memaksimalkan dari proses layanan administrasi pemerintah serta intensitas dalam sosialisasi serta pemberian pemahaman SPBE pada cakupan tata kelola SPBE dan koordinasi serta sinergitas rencana aksi untuk tata kelola Smart City

Adapun upaya - upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan tata kelola dan smart city diantaranya yaitu:

- Pendampingan dan layanan kepada OPD dalam pengembangan aplikasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Penyusunan dokumen tata kelola SPBE yang berupa arsitektur SPBE.
- Sosialisasi berkelanjutan kepada OPD terkait SPBE dan Smart City sehingga terbentuk kerjasama dan kolaborasi di bidang TIK antar OPD di Kabupaten.
- Peningkatan infrastruktur TIK yang mendukung layanan pemerintah daerah dan inisiatif smart city, termasuk pembangunan jaringan broadband, pusat data, dan infrastruktur komunikasi lainnya serta layanan pembuatan domain di magetan.go.id

2. Indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adapun capaian informasi atau publikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang sudah tersampaikan kepada masyarakat maka didapatkan capaian sebesar 82,63 % yang termasuk dalam kategori berhasil. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diantaranya adalah meningkatnya kreatifitas dalam pengelolaan komunikasi dan tepatnya pemilihan strategi komunikasi publik. Sedangkan hal hal yang harus ditingkatkan adalah keaktifan PPID Pelaksana dalam penyampaian informasi dan sarana media komunikasi.

3. Indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas.

Berdasarkan pengukuran indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas, capaian kinerja termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dengan capaian

sebesar 111,98 %. Faktor yang mempengaruhi capaian persentase data statistik sektoral yang berkualitas yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan berkala kepada OPD Produsen dalam rangka pengelolaan Data Statistik Sektoral. Hal ini mengakibatkan semakin banyak OPD Produsen Data yang mengirimkan Data Statistik Sektoral kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data untuk dikelola dan dipublikasikan.
 2. Penggunaan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
 3. Pengembangan Aplikasi Dashboard Portal Satu Data Magetan (Dasatama). Aplikasi ini selain mempermudah pengelolaan data statistik sektoral, juga memudahkan memudahkan pengguna data untuk mendapatkan data yang diperlukan.
 4. Kerjasama dengan BPS dalam rangka sosialisasi terkait Data Statistik Sektoral kepada OPD.
4. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi termasuk dalam kategori Sangat Berhasil, dengan capaian sebesar 108,7 %. Adapun keberhasilan tersebut didukung upaya – upaya sebagai berikut :

1. Pendampingan secara berkelanjutan kepada OPD terkait keamanan informasi bagi instansi pemerintah.
2. Pelaksanaan sosialisasi SMKI kepada OPD.
3. Pelayanan penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh Kepala OPD.
4. Pelaksanaan Launching CSIRT, Penggunaan Web CSIRT dan Aplikasi Honeynet.

Meskipun demikian, masih sangat diperlukan adanya peningkatan terkait kebijakan - kebijakan keamanan informasi bagi setiap Perangkat Daerah.

5. Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengukuran SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Adapun capaian nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 99,9 % termasuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara efektif, efisien, dan transparan, juga

mencerminkan kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk merencanakan, mengelola, mengukur, dan melaporkan kinerja sesuai dengan tujuan pembangunan serta penggunaan anggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*). Hal – hal yang mendukung keberhasilan diantaranya adalah perencanaan kinerja yang tepat sasaran yaitu selaras dengan Tujuan, Sasaran serta Prioritas pembangunan daerah, adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola kinerja dan anggaran yang baik. Meskipun demikian, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam peningkatan SAKIP diantaranya terkait keterbatasan data yang kinerja yang valid dan reliabel.

6. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. IKM bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan secara obyektif, terukur, dan transparan, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sebesar 103,45 % (Sangat Berhasil). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa layanan publik yang disediakan oleh Dinas Kominfo telah memenuhi kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Hal – hal yang mendukung keberhasilannya diantaranya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan layanan yang diberikan, adanya dukungan sarana prasarana termasuk dukungan teknologi serta tersedianya layanan pengaduan yang efektif.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

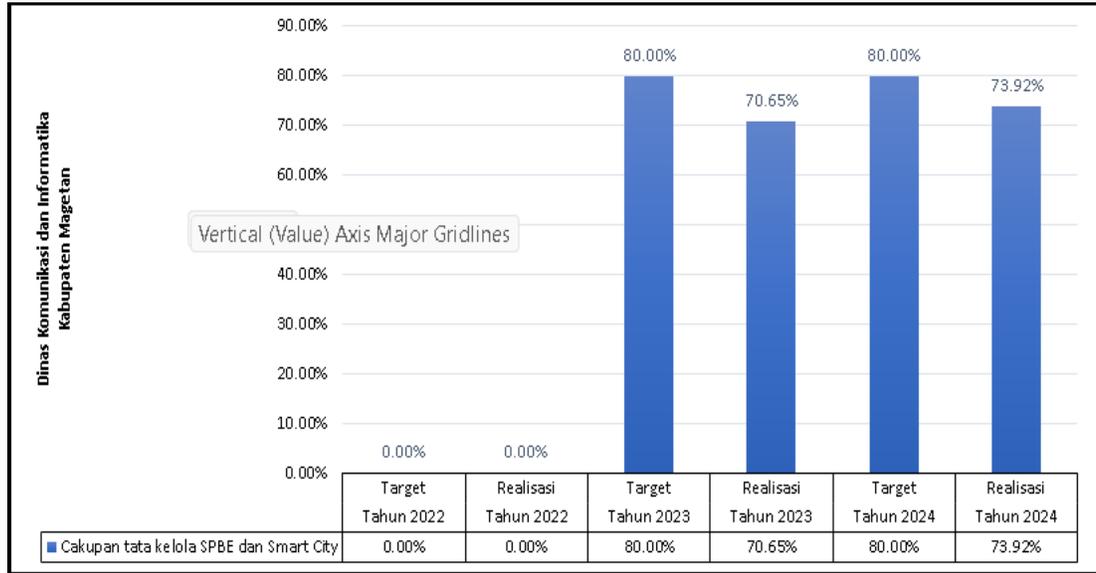
Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya	Cakupan tata kelola	-	-	-	80 %	70,65%	88,31 %	80 %	73,92 %	92,4 %

Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE dan Smart City									
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	90 %	74,37 %	82,63 %
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	86 %	96,3 %	111,98 %
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	18	27,78	154,33	21 %	43,48 %	207,05%	44 %	47,83 %	108,7 %
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	86,90	88,20	101,5	87,00	86,28	99,17 %	89,50	89,41	99,9 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	80,75	81,94	101,48	81	84,62	104,47 %	84,7	87,62	103,45 %

a. **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Grafik 3.3.1

Capaian Realisasi Sasaran Strategis 1

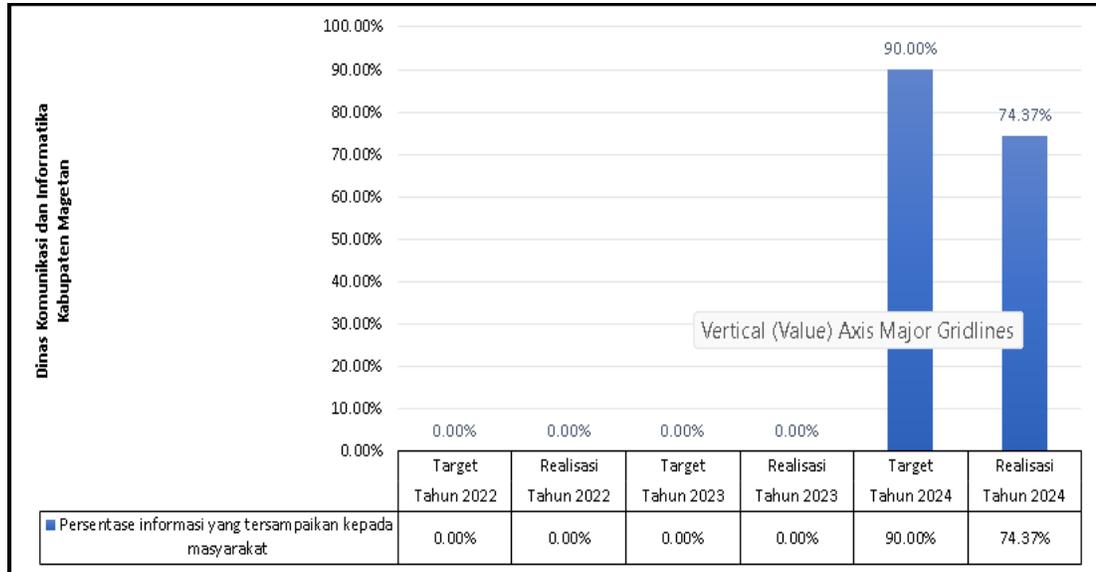


Realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City Tahun 2024 mencapai 73,92% dengan capaian kinerja sebesar 92,4 %. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,27% dan 4,09%. Kenaikan tersebut dikarenakan bertambahnya Perangkat Daerah yang telah menerapkan tata kelola SPBE dan Smart City dalam rangka pelaksanaan E-Government. Tahun 2023 Perangkat Daerah yang telah menerapkan tata kelola SPBE sekaligus Smart City sebanyak 19 OPD sedangkan Tahun 2024 sebanyak 22 OPD. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Smart City serta keberhasilan penyusunan dokumen arsitektur SPBE yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Magetan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik 3.3.2

Capaian Realisasi Sasaran Strategis 2

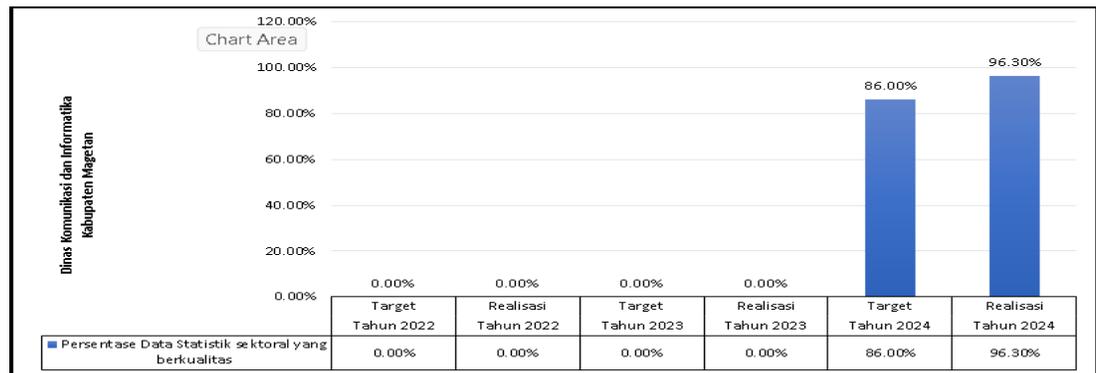


Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat Tahun 2024 mencapai 73,92% dengan capaian kinerja sebesar 82,63 %. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang bermanfaat untuk mengukur sejauh mana publikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika telah sampai kepada masyarakat. Publikasi dilakukan melalui medsos, baliho, media elektronik, media massa, dll.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor.

Grafik 3.3.3

Capaian realisasi Sasaran Strategis 3

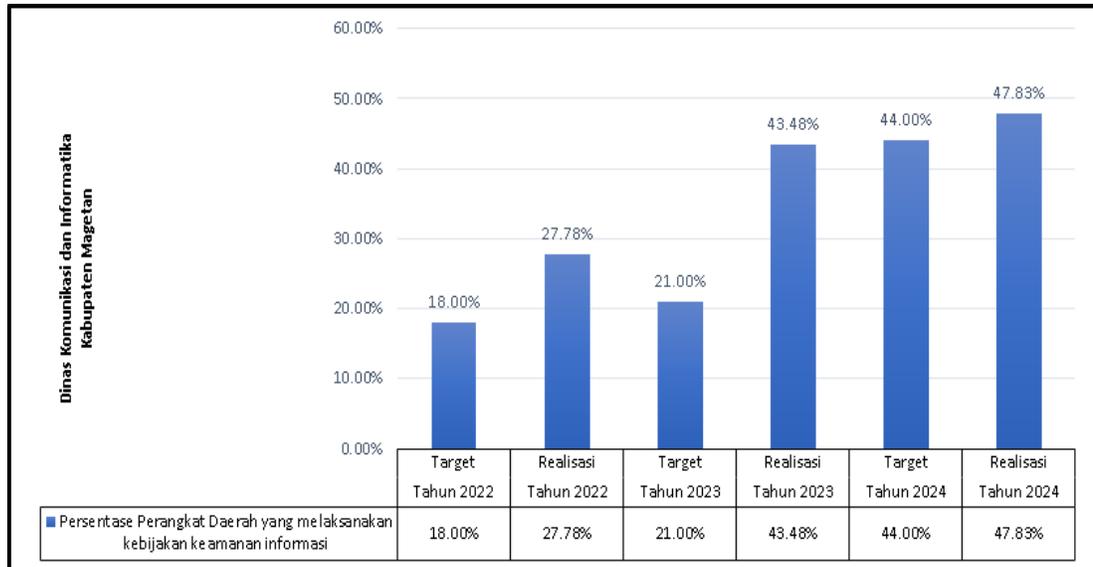


Realisasi kinerja sasaran 3 **Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor** dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas Tahun 2024 mencapai 96,3 % dengan capaian kinerja sebesar 111,98 %. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang bermanfaat untuk mengukur kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Jadi untuk realisasi belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Sasaran 4 : Meningkatkan keamanan informasi daerah.

Grafik 3.3.4

Capaian realisasi Sasaran Strategis 4

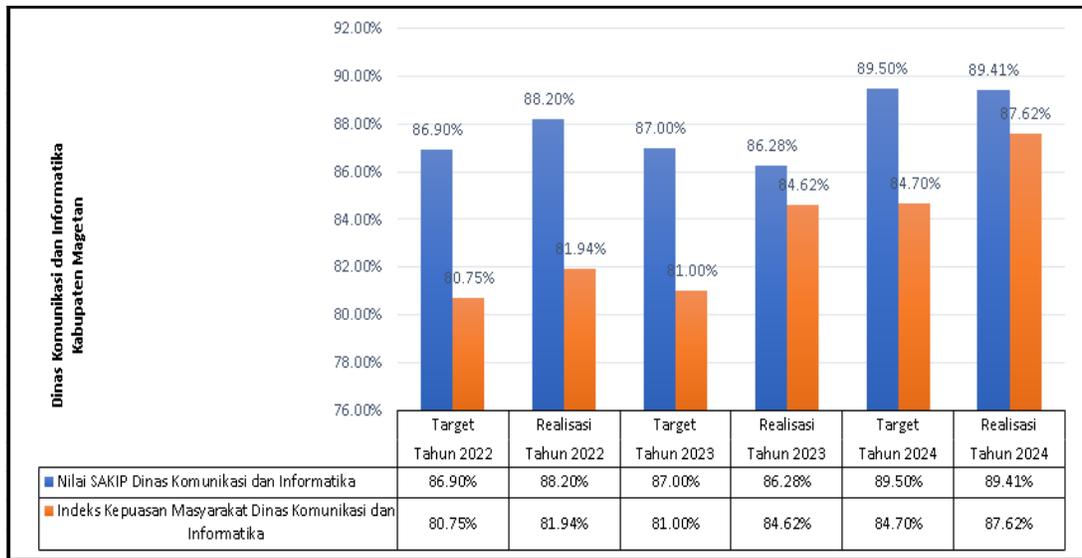


Realisasi kinerja sasaran 4 **Meningkatnya keamanan informasi daerah** dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi Tahun 2024 mencapai 47,83 % dengan capaian kinerja sebesar 108,7 %. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 4,35 % dan 20,05 % dari tahun 2022. Kenaikan tersebut dikarenakan bertambahnya Perangkat Daerah yang telah menerapkan kebijakan keamanan informasi. Tahun 2023 Perangkat Daerah yang telah menerapkan kebijakan keamanan informasi 20 OPD sedangkan Tahun 2024 sebanyak 22 OPD. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran serta Dinas Komunikasi dan

Informatika selaku koordinator pelaksanaan keamanan informasi di Kabupaten Magetan.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Grafik 3.3.5.1
Capaian realisasi Sasaran Strategis 5



Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mencapai 89,41 dengan capaian kinerja sebesar 99,9 %. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 3,13 dan 1,21 dari tahun 2022. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mencapai 87,62 dengan capaian kinerja sebesar 103.45 %. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa

realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 3 dan 5,68 dari tahun 2022. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	73,92%	82 %	90,15
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	74,37 %	95 %	78,28
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	96,3 %	88 %	109,43
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	47,83 %	65 %	73,58
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatik	89,41	89,70	99,68

Komunikasi dan Informatika	a			
	Indeks Kepuasan Masyarakat t Dinas Komunikasi dan Informatika	87,62	85,8	113,78

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City tahun 2024 adalah sebesar 73,92 %. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 82 % (tingkat kemajuan capaian 90,15 terhadap target akhir renstra) sehingga untuk mencapai target akhir Renstra masih harus mencapai 8,08 %.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 74,37 %. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 95 % (tingkat kemajuan capaian 78,28 terhadap target akhir renstra) sehingga untuk mencapai target akhir Renstra masih harus mencapai 20,63 %.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas tahun 2024 adalah sebesar 96,3 %. Realisasi ini sudah mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 88 % (tingkat kemajuan capaian 109,43 terhadap target akhir renstra).

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi daerah.

Realisasi kinerja sasaran 4 Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi tahun 2024 adalah sebesar 47,83 %. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 65 % (tingkat kemajuan capaian 73,58 terhadap target akhir renstra). sehingga untuk mencapai target akhir Renstra masih harus mencapai 17,17 %.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 89,41. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 89,70 (tingkat kemajuan capaian 99,68 terhadap target akhir renstra). sehingga untuk mencapai target akhir Renstra masih harus mencapai 0,29.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 87,62. Realisasi ini sudah mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 85,8 (tingkat kemajuan capaian 113,78 terhadap target akhir Renstra).

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	NIHIL				

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	80 %	73,92	92,4	<p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan ada pada domain manajemen SPBE yang baru bisa mendapatkan nilai di atas tingkat kematangan 1, apabila sudah masuk ke peta rencana SPBE, sedangkan peta rencana SPBE baru dibuat akhir tahun 2024. Kemudian lemahnya di bagian kebijakan internal maupun perencanaan SPBE. - Belum semua OPD melaksanakan tata kelola Smart city. <p>Keberhasilan :</p> <p>Capaian meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya upaya memaksimalkan dari proses layanan administrasi pemerintah serta intensitas dalam sosialisasi serta pemberian pemahaman SPBE pada cakupan tata kelola SPBE dan koordinasi serta sinergitas rencana aksi untuk tata kelola Smart City</p>
Meningkatnya Keterbukaan	Persentase informasi	90 %	74,37 %	82,63	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soliditas tim dalam

Informasi Publik	yang tersampaikan kepada masyarakat				<p>pelaksanaan komunikasi dan informasi publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kreatifitas dalam pengelolaan komunikasi - Pemilihan strategi komunikasi publik <p>Kegagalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang akifnya PPID Pelaksana dalam penyampaian informasi - Kurangnya sarana media komunikasi - Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi/bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	86 %	96,3 %	111,98	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan - Penggunaan DASATAMA dalam pengisian data statistik sektoral
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44 %	47,83 %	108,7	<p>Keberhasilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Launching CSIRT - Penggunaan Web CSIRT - Penggunaan Aplikasi Honeynet

Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50	89,41	99,9	Masih adanya target kegiatan yang belum mempertimbangkan realisasi target tahun sebelumnya.
Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	84,7	87,62	103,45	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan publik.

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City tahun 2024 adalah sebesar 73,92 % dengan capaian kinerja sebesar 92,4 %. Realisasi Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 yaitu 70,65 %. Peningkatan realisasi didukung dengan upaya memaksimalkan dari proses layanan administrasi pemerintah serta intensitas dalam sosialisasi serta pemberian pemahaman SPBE pada cakupan tata kelola SPBE dan koordinasi serta sinergitas rencana aksi untuk tata kelola Smart City. Meskipun realisasi mengalami peningkatan tetapi realisasi belum bisa mencapai target karena belum semua OPD melaksanakan tata kelola smart city dan Peta rencana SPBE baru tersusun pada akhir tahun 2024 sehingga belum bisa dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan manajemen SPBE.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 74,37 % dengan capaian kinerja sebesar 82,63 %. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang memerlukan banyak dukungan dan masih mempunyai kekurangan dalam pencapaian target. Beberapa hal yang

mendukung diantaranya adalah soliditas tim dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi publik, meningkatnya kreatifitas dalam pengelolaan komunikasi, pemilihan strategi komunikasi publik yang tepat. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target diantaranya kurang aktifnya PPID Pelaksana dalam penyampaian informasi, kurangnya sarana media komunikasi serta kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi/bidang komunikasi dan informasi.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas tahun 2024 adalah sebesar 96,3 % dengan capaian kinerja sebesar 111,98 %. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang memerlukan banyak dukungan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian target yaitu penggunaan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, penggunaan DASATAMA dalam pengisian data statistik, meningkatnya jumlah data statistik yang berkualitas yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah produsen data.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi daerah.

Realisasi kinerja sasaran 4 Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi tahun 2024 adalah sebesar 47,83 dengan capaian kinerja sebesar 108,7 %. Realisasi Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 yaitu 43,48 %. Peningkatan realisasi didukung dengan adanya Launching CSIRT, penggunaan Web CSIRT dan Aplikasi Honeynet dalam pelaksanaan keamanan informasi di Kabupaten Magetan.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 89,41 dengan capaian kinerja sebesar 99,9 %. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan tetapi realisasi kinerja Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 86,28. Hal yang mendukung peningkatan

realisasi kinerja adalah adanya upaya penyelarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja, meskipun masih terdapat penyusunan target kegiatan yang belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 87,62 dengan capaian kinerja sebesar 103,45 %. Realisasi Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 yaitu 84,62. Peningkatan realisasi didukung dengan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM pelayanan publik.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	Belum tersusunnya Arsitektur dan peta rencana SPBE yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan SPBE.	Peta rencana dan Arsitektur SPBE telah dianalisis dan dipetakan pada akhir tahun 2024, sehingga dapat menjadi acuan dari proses pelaksanaan Manajemen SPBE maupun pelaksanaan kegiatan SPBE di kabupaten Magetan. Untuk detail manajemen SPBE direncanakan akan dibuat di tahun 2025
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	- Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara	- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar OPD - Meningkatkan Pelatihan dan

		<p>organisasi perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media informasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi. - Kurangnya kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informasi (kehumasan) 	<p>Keterampilan bidang komunikasi dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan sarana komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
<p>Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral</p>	<p>Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fitur-fitur di Portal DASATAMA - Belum adanya roadmap / peta rencana penyelenggaraan statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengembangan fitur pada DASATAMA - Penyusunan roadmap/peta rencana statistik penyelenggaraan statistik sektoral
<p>Meningkatnya keamanan informasi daerah</p>	<p>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya assessment oleh badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI - Belum adanya sertifikasi ISO SMKI 27001 dan Audit Indeks KAMI oleh badan yang berkompeten / bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan assessment dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI - Melaksanakan sertifikasi ISO 27001 dan audit Indeks KAMI dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi

Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Masih adanya beberapa target perencanaan yang belum disesuaikan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya.	Melakukan upaya untuk menelaraskan / menyesuaikan target kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya agar target dari tahun ke tahun yang berkaitan tercapai.
Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM pelayanan publik.	Melakukan upaya perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM pelayanan publik.

Uraian penjelasan tabel :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City tahun 2024 adalah sebesar 73,92 % dengan capaian kinerja sebesar 92,4 %. Realisasi Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 yaitu 70,65 %. Dalam pencapaian target terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya adalah belum tersusunnya Arsitektur dan peta rencana SPBE yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan SPBE. Untuk itu, di akhir Tahun 2024 ini Peta rencana dan Arsitektur SPBE telah dianalisis dan dipetakan, sehingga dapat menjadi acuan dari proses pelaksanaan Manajemen SPBE maupun pelaksanaan kegiatan SPBE di Kabupaten Magetan. Untuk detail manajemen SPBE direncanakan akan dibuat di tahun 2025.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 74,37 % dengan capaian kinerja sebesar 82,63 %. Adapun permasalahan dalam pencapaian target yaitu kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah, kurangnya media informasi yang mengikuti

perkembangan teknologi serta masih kurangnya kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informasi khususnya yang terkait kehumasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa dilakukan beberapa solusi yaitu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar OPD, meningkatkan pelatihan dan keterampilan SDM bidang komunikasi dan informasi serta penambahan sarana komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas tahun 2024 adalah sebesar 96,3 % dengan capaian kinerja sebesar 111,98 %. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang memerlukan banyak dukungan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu kurangnya fitur - fitur di Portal DASATAMA dan belum tersusunnya roadmap / peta rencana penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengembangan fitur pada DASATAMA dan Penyusunan roadmap/peta rencana statistik penyelenggaraan statistik sektoral.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi daerah.

Realisasi kinerja sasaran 4 Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi tahun 2024 adalah sebesar 47,83 dengan capaian kinerja sebesar 108,7 %. Permasalahan dalam pencapaian kinerja adalah belum adanya assessment oleh badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI serta belum adanya sertifikasi ISO SMKI 27001 dan Audit Indeks KAMI oleh badan yang berkompeten / bersertifikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal yang dilakukan adalah melakukan assessment dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI serta melaksanakan sertifikasi ISO 27001 dan audit Indeks KAMI dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 89,41 dengan capaian kinerja sebesar 99,9 %. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah masih adanya beberapa target perencanaan yang belum disesuaikan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka yang dilakukan adalah melakukan upaya penyesuaian dan memastikan target kinerja sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 87,62 dengan capaian kinerja sebesar 103,45 %. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM pelayanan publik, sehingga untuk mengatasinya dilakukan upaya perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM pelayanan publik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	92,4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan	148	2.398.298.870	Menunjang

			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	100	1.230.919.183	Menunjang
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE	100	1.167.379.687	Menunjang
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	82,63	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi	97.22	1.020.900.866	Menunjang
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang disampaikan melalui Media	141.75	1.020.900.866	Menunjang
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	111,98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang diolah dan disajikan	116.28	245.703.508	Menunjang

			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	100.00	245.703.508	Menunjang
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	108,7	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi	79.71	108.000.000	Menunjang
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100.00	108.000.000	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	99,9	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika	104.73	5.522.171.513	Menunjang

	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	87,70	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	114.29	35.000.000	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	107.11	3.687.384.407	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	100.00	35.000.000	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	450.311.106	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100.00	1.046.152.000	Menunjang

				Pemerintahan Daerah			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100.00	268.324.000	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City tahun 2024 adalah sebesar 73,92 % dengan capaian kinerja sebesar 92,4 %. Sasaran 1 ditunjang oleh 1 program dan 2 kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator persentase jumlah aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan, yang realisasi kinerjanya 148 % dengan anggaran Rp. 2.398.298.870,00.
2. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO, yang realisasi kinerjanya 100% dengan anggaran Rp. 1.230.919.183,00.
3. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE , yang realisasi kinerjanya 100% dengan anggaran Rp. 1.167.379.687,00.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 74,37 % dengan capaian kinerja sebesar 82,63 %.Sasaran 2 ditunjang oleh 1 program dan 1 kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi

Informasi, yang realisasi kinerjanya sebesar 97.22% dengan anggaran Rp. 1.020.900.866, 00.

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media yang realisasi kinerjanya sebesar 141,75% dengan anggaran Rp. 1.020.900.866, 00.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas tahun 2024 adalah sebesar 96,3 % dengan capaian kinerja sebesar 111,98. Sasaran 3 ditunjang oleh 1 program dan 1 kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase data yang di olah dan disajikan, yang realisasi kinerjanya sebesar 116.28% dengan anggaran Rp. 245.703.508, 00.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi Kabupaten Magetan dan realisasi kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 245.703.508, 00.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi daerah.

Realisasi kinerja sasaran 4 Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi tahun 2024 adalah sebesar 47,83 dengan capaian kinerja sebesar 108,7 %. Sasaran 4 ditunjang oleh 1 program dan 1 kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi, yang capaian kinerjanya sebesar 79.71% dengan anggaran Rp. 108.000.000, 00.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, yang capaian kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 108.000.000,00

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 89,41 dengan capaian kinerja sebesar 99,9 %.

Realisasi kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebesar 87,62 dengan capaian kinerja sebesar 103,45 %. Sasaran 5 ini ditunjang oleh 1 program dan 6 kegiatan yaitu :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang capaian kerjanya sebesar 104,73% dengan anggaran Rp. 5.522.171.513,00.
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu, yang capaian kerjanya sebesar 104,73% dengan anggaran Rp. 35.000.000,00.
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah, yang capaian kerjanya sebesar 107,11% dengan anggaran Rp. 3.687.384.407,00.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur, yang capaian kerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 35.000.000,00.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang capaian kerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 450.311.106,00.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, yang capaian kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 1.046.152.000,00.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara, yang capaian kinerjanya sebesar 100% dengan anggaran Rp. 268.324.000,00.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang TIK	2.398.298.870	2.322.267.192	96,83
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang TIK	1.230.919.183	1.213.526.135	98,59
1.2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang TIK	1.167.379.687	1.108.741.057	94,98
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang IKP	1.020.900.866	1.003.167.228	98,26
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang IKP	1.020.900.866	1.003.167.228	98,26
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang SDP	245.703.508	244.964.868	99,70
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Bidang SDP	245.703.508	244.964.868	99,70

	Kabupaten/Kota				
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Bidang SDP	108.000.000	107.882.300	99,89
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang SDP	108.000.000	107.882.300	99,89
5	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sekretariat	5.522.171.513	5.316.457.754	96,27
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	35.000.000	34.891.600	99,69
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	3.687.384.407	3.594.030.046	97,47
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	35.000.000	34.450.000	98,43
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	450.311.106	433.255.273	96,21
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	1.046.152.000	977.548.280	93,44
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	268.324.000	242.282.555	90,30

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya	Cakupan tata	80 %	73,92	92,4	2.398.298.870	2.322.267.192	96,83	-0.05

Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	kelola SPBE dan Smart City							
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90 %	74,37 %	82,63	1.020.900.866	1.003.167.228	98,26	-0.19
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	86 %	96,3 %	111,98	245.703.508	244.964.868	99,70	0.11
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44 %	47,83 %	108,7	108.000.000	107.882.300	99,89	0.08
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50	89,41	99,9	35.000.000	34.891.600	99,7	0.00
Penyelesaian Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,7	87,62	103,45	5.487.171.513	5.281.566.154	96,25	0.07

tahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	kat Dinas Komunikasi dan Informatika							
Efisiensi Total								1,84 %

Uraian penjelasan tabel :

- a. Tingkat efisiensi dari sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City tercapai sebesar -0.05 dari anggaran Rp. 2.398.298.870,00.
- b. Tingkat efisiensi dari sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tercapai sebesar - 0.19 dari anggaran Rp. 1.020.900.866,00.
- c. Tingkat efisiensi dari sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas tercapai sebesar 0.11 dari anggaran Rp. 245.703.508,00.
- d. Tingkat efisiensi dari sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi tercapai sebesar 0.08 dari anggaran Rp. 108.000.000,00.
- e. Tingkat efisiensi dari sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai sebesar 0,00 dari anggaran Rp. 35.000.000,00. Sedangkan tingkat efisiensi dari sasaran 5 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai sebesar 0.07 dari anggaran Rp. 5.487.171.513,00

Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebesar 1,84% dari anggaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	50 %	74 %	148	2.398.298.870	2.322.267.192	96,83	0.35
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 OPD	15 OPD	100	1.230.919.183	1.213.526.135	98,59	0.01
1.2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.167.379.687	1.108.741.057	94,98	0.05
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	90 %	87,5 %	97,22	1.020.900.866	1.003.167.228	98,26	-0.01
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1200 Berita	1701 Berita	141,75	1.020.900.866	1.003.167.228	98,26	0.31
3	Program Penyelenggaraan Statistik	86 %	100 %	116,28	245.703.508	244.964.868	99,70	0.14

	Sektoral							
3.1	Penyelenggara n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	3 Doku men	3 Dokume n	100	245.703. 508	244.964. 868	99,70	0.00
4	Program Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi	60 %	47,83 %	79,71	108.000. 000	107.882. 300	99,89	-0.25
4.1	Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	46 OPD	46 OPD	100	108.000. 000	107.882. 300	99,89	0.00
5	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 Skor	83,78 skor	104,73	5.522.17 1.513	5.316.45 7.754	96,27	0.08
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Doku men	16 Dokume n	114,29	35.000.0 00	34.891.6 00	99,69	0.13
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91 %	97,47 %	107,11	3.687.38 4.407	3.594.03 0.046	97,47	0.09
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 orang	40 orang	100	35.000.0 00	34.450.0 00	98,43	0.02
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 paket	100	450.311. 106	433.255. 273	96,21	0.04
5.5	Penyediaan	12	12	100	1.046.15	977.548	93,44	0.07

	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lapor an	Laporan		2.000	.280		
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Unit	16 Unit	100	268.324. 000	242.282 .555	90,29	0.10
Total Efisiensi								13,03 %

Dengan berdasarkan PMK No.214 tahun 2017 maka didapatkan :

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{$$

$$(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})$$

Efisiensi total =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}}{$$

$$(\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) + (\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) + \text{dst}}$$

Uraian penjelasan tabel :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Dengan capaian kinerja sebesar 148%, pagu anggaran Rp. 2.398.298.870,00 dan realisasi Rp. 2.322.267.192,00 maka efisiensi kinerja program tercapai sebesar 0,35. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi kinerja dari kegiatan ini sebesar 0.01 dari anggaran sebesar Rp. 1.230.919.183,00
- b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi kinerja dari kegiatan ini sebesar 0.05 dari anggaran sebesar Rp. 1.167.379.687,00

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dengan capaian kinerja sebesar 97,22%, pagu anggaran Rp. 1.020.900.866,00 dan realisasi anggaran Rp. 1.003.167.228,00 maka efisiensi program tercapai -0,01. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi dari kegiatan ini sebesar 0.31 dari anggaran Rp. 1.020.900.866,00

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dengan capaian kinerja sebesar 116,28%, pagu anggaran Rp. 245.703.508,00 dan realisasi anggaran Rp. 244.964.868,00 maka efisiensi program tercapai sebesar 0.14. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi dari kegiatan ini sebesar 0.00 dari anggaran Rp. 245.703.508,00

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dengan capaian kinerja program sebesar 79,71%, pagu anggaran Rp. 108.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 107.882.300,00 maka efisiensi program tercapai sebesar -0.25. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai efisiensi sebesar 0.00 dari anggaran Rp. 108.000.000,00

5. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan capaian kinerja program sebesar 104,73, pagu anggaran Rp. 5.522.171.513,00 dan realisasi anggaran Rp. 5.316.457.754 maka efisiensi program tercapai sebesar 0.08. Program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0.13 dari anggaran Rp. 35.000.000,00.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0.09 dari anggaran Rp. 3.687.384.407,00.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0,02 dari anggaran Rp. 35.000.000,00.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0,04 dari anggaran Rp. 450.311.106,00.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0,07 dari anggaran Rp. 1.046.152.000,00.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai efisiensi sebesar 0,10 dari anggaran Rp. 268.324.000,00.

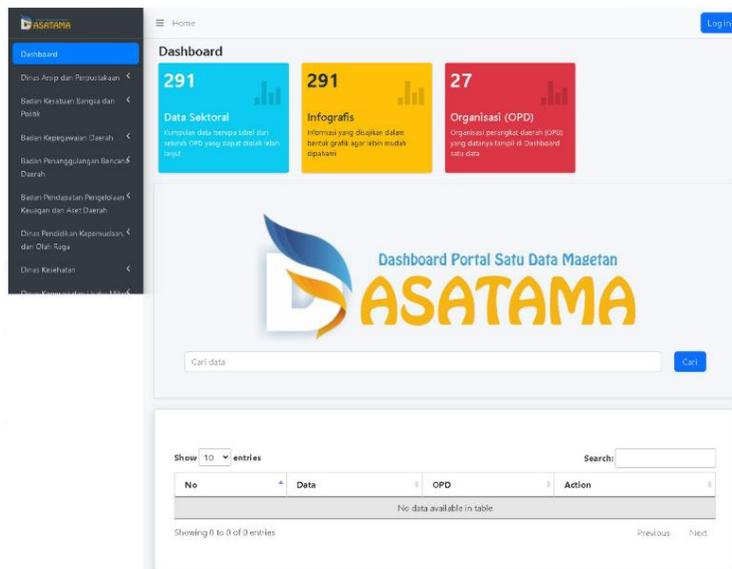
Secara umum efisiensi kinerja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebesar 13,03% .

D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. DASATAMA.

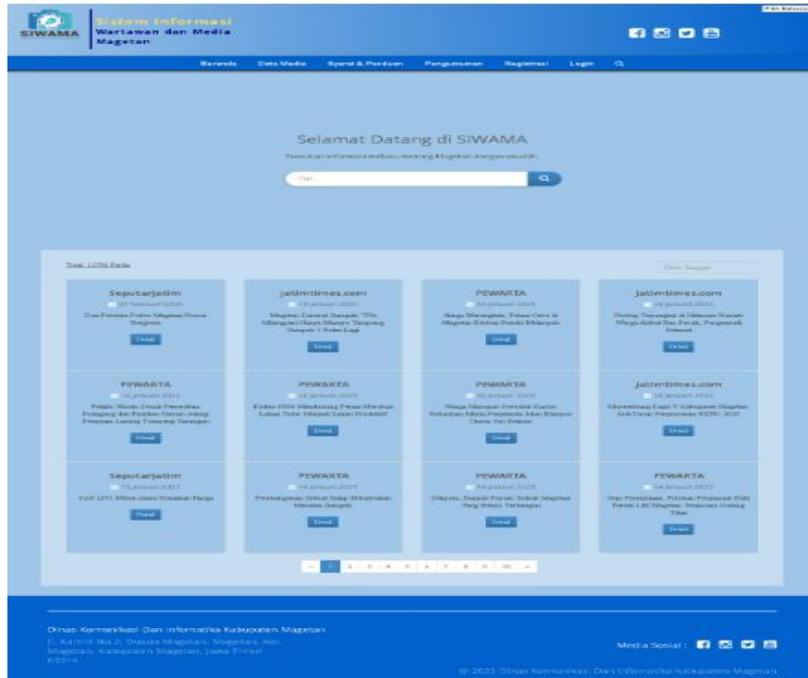
DASATAMA merupakan aplikasi yang dibagi pakaikan untuk pemrosesan dan penyajian Data Statistik Sektoral Kab. Magetan berdasarkan standarisasi data, metadata dan interoperabilitas data dari para Produsen Data. Aplikasi ini berbentuk “Dashboard”, yang artinya penyajian Informasinya terkumpul dan terorganisasi yang ditampilkan sekilas dalam bentuk layar tunggal.



2. SIWAMA.

Sistem Informasi Wartawan dan Media Magetan (SIWAMA) adalah aplikasi yang dikembangkan secara khusus oleh Pemkab. Magetan melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk mendukung terwujudnya kebijakan Pemerintah Indonesia yaitu Satu Data Indonesia. SIWAMA diharap dapat memenuhi kebutuhan atas data yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh kepada masyarakat Magetan terkait perusahaan media, wartawan maupun kegiatan kejournalistikan.



E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024.

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Sasaran ke-1 Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,4 % (kategori Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) Indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan;

- Sasaran ke-1 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 148 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil) dan 100 % (Kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 2: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 82,63% (kategori Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu.) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,22 % (kategori Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 141,75 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektor

- Sasaran ke-3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 111,98 % (kategori Sangat Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu.) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 116,28 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 4: Meningkatkan keamanan informasi daerah

- Sasaran ke-4 Meningkatnya keamanan informasi daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,98 % (kategori Sangat Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sasaran ke-4 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 79,71 % (kategori Berhasil)
- Sasaran ke-4 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

- Sasaran ke-5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,9 % (kategori Berhasil) dan 103,45 % (kategori Sangat Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sasaran ke-5 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,73 % (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-5 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari masing – masing kegiatan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 114,29 % (kategori Sangat Berhasil), 107,11 (kategori Sangat Berhasil), 100 % (kategori Sangat Berhasil).

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	80 %	73,92 %	92,4
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90 %	74,37 %	82,63
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	86 %	96,3 %	111,98
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44 %	47,83 %	108,7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50	89,41	99,9

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	84,7	87,62	103,45
Capaian Kinerja				99,84
				BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum belum mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99,84 % dengan serapan anggaran sebesar Rp.8.994.739.342,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 1,84.%. Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 23,23 %.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja dan menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Adanya beberapa indikator kinerja baru di tahun 2024.
- Baru tersusunnya Arsitektur dan peta rencana SPBE di akhir tahun 2024 sehingga belum bisa dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SPBE.
- Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD, media informasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi, kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informasi (kehumasan)
- Kurangnya fitur pada DASATAMA dan belum tersusunnya roadmap/peta rencana statistik penyelenggaraan statistik sektoral
- Belum terlaksananya assessment dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI serta melaksanakan sertifikasi ISO 27001 dan audit Indeks KAMI dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan untuk meningkatkan capaian kinerja maka diperlukan langkah - langkah perbaikan kinerja ke depan sebagai berikut :

- Peta rencana dan Arsitektur SPBE telah dianalisis dan dipetakan, sehingga dapat menjadi acuan dari proses pelaksanaan Manajemen SPBE maupun pelaksanaan kegiatan SPBE di Kabupaten Magetan. Untuk detail manajemen SPBE direncanakan akan dibuat di tahun 2025.

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar OPD, meningkatkan pelatihan dan keterampilan SDM bidang komunikasi dan informasi serta penambahan sarana komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
- Pengembangan fitur pada DASATAMA dan Penyusunan roadmap/peta rencana statistik penyelenggaraan statistik sektoral.
- Melakukan assessment dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI serta melaksanakan sertifikasi ISO 27001 dan audit Indeks KAMI dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi.
- Penyelarasan dan memastikan target kinerja sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.
- Peningkatan / perbaikan sarana prasarana dan kualitas SDM pelayanan publik

Serapan anggaran tahun 2024 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,55 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembuatan peta rencana dan penyusunan dokumen manajemen SPBE.
Meningkatnya Kualitas Teknologi	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	1. Proses pembuatan untuk peta rencana SPBE 2. Proses dalam Manajemen SPBE.

Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		3. Penguatan dalam kebijakan internal SPBE maupun Smart City
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Visitasi OPD walaupun tidak seluruh OPD untuk perwakilan - Rapat koordinasi Pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana - Bimbingan teknis secara mendalam terhadap pengelolaan PPID bagi Pejabat Pengelola PPID Pelaksana - Kegiatan merilis berita melalui website dan media sosial - Melakukan sosialisasi kepada OPD bagaimana cara OPD menyampaikan hasil pembangunan dan pelayanan pada masyarakat yang cepat serta menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan - Melaksanakan kegiatan bimtek jurnalistik baik penulisan berita maupun pengambilan gambar bagi ASN atau masyarakat - Mengadakan media gathering untuk membangun hubungan positif antara pemerintah daerah dengan media massa - Menayangkan potensi daerah sebagai salah satu cara memperkenalkan Kabupaten Magetan - Pembuatan majalah harian - Menayangkan kegiatan pemerintah secara live streaming / siaran ulang melalui youtube chanel Diskominfo Kabupaten Magetan - Pemasangan baleho yang berkaitan dengan informasi dan kebijakan daerah - Pembuatan leaflet, pamflet, poster dan booklet - Pemasangan iklan layanan masyarakat (advetorial di media cetak/online/elektronik) dengan skla lokal, regional dan nasional - Penyebarluasan informasi melalui radio baik berita maupun dialog/podcast - Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang pembangunan maupun kebijakan pemerintah - Mengumpulkan opini masyarakat tentang saran dan kritik melalui kanal pengaduan resmi Kabupaten Magetan (SPAN LAPOR atau WANI

		BARES)
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	- Pengembangan Portal DASATAMA dengan penambahan fitur-fitur - Pengintegrasian portal DASATAMA dengan aplikasi lain
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	- Melakukan assessment dengan badan yang berkompeten / bersertifikasi terkait pengisian indeks KAMI
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan evaluasi kinerja dan upaya peningkatan kinerja.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	10%	20%	20%	31%	81%
SASARAN II	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	23%	23%	23%	23%	92%
SASARAN III	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	7%	27%	31%	33%	98%
SASARAN IV	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	-	20%	20%	20%	60%
SASARAN V	Nilai SAKIP Dinas	-	-	-	89,60	89,60

	Komunikasi dan Informatika					
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	87,70	87,70

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197605201995111001

LAMPIRAN

A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kartini Nomor 2 Magetan, Jawa Timur 63314,
Telepon (0351) 8197913 Faksimilie.....
Laman kominfo.magetan.go.id, Pos-el kominfo@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 900.1.3 / 9 / Kept / 403.113 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PERUMUS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perumusan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dipandang perlu untuk membentuk Tim Perumus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
 - b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menimbang :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan materi sebagai bahan perumusan SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;
 - b. Memfasilitasi perumusan SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas perumusan SAKIP kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : M A G E T A N

Pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kab. Magetan
 Nomor : 900.1.3/ 9 / Kept. /403.113/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGURUS
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MAGETAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
4	Anggota	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
		3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		4. Kepala Seksi Data dan Statistik	
		5. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	
		6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1. Fajar Syamsu, S.Sos 2. Dwi Anita Mardalina, S.Sos
		8. Pranata Komputer Muda	1. Hendro Wicaksono, S.Kom 2. Cahyaningtyas Kushardina, S.Kom.
		9. Analis Rencana Program Dan Kegiatan	Liberty Martha Retrianawati, S.E.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		10. Pengadministrasi Keuangan	Moedjiwatiningsih
		11. Pranata Komputer Terampil	Agus Eko Pratomo, A.Md

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP.,M.SI.

Perencana Dharma Muda

NIP. 197605201995111001

B. Matriks Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan ke 5 RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran ke 3 : Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan		Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2024				2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	%	Jumlah OPD yang menerapkan Tata Kelola SPBE dan Smart City dibagi jumlah OPD Kabupaten Magetan kali 100	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government	80%	81%	82%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan II %	
									Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	
									Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	
									Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE 11 Dokumen	
									Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota II Dokumen	
									Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola II unit	
									Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan II Unit	
									Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City II Dokumen	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah II Dokumen	
									Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) II Dokumen	
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE II Dokumen	
									Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital II Orang	
	2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi yang disampaikan dibagi Jumlah masyarakat yang disurvei dikali 100	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif dalam bentuk penyebaran informasi dan pelayanan informasi	90%	92%	95%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
									Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi II %	
									Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media II Berita	
									Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik II Dokumen	
									Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah II Dokumen	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik II Dokumen
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik II Dokumen
									Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik II Dokumen
									Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media II Layanan
									Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnyall Orang
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakanll Komunitas
	3 Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	%	Jumlah Data statistik sektoral yang berkualitas dibagiJumlah data statistic sektoral daerah kali 100	Mengoptimalkan Pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya	86%	87%	88%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang di olah dan disajikan ll %
									Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan ll Dokumen
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral ll Dokumen

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS II orang
									Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi II Orang
									Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun II Dokumen
									Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik II Dokumen
	4 Meningkatkan kualitas keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di banding jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah	44%	60%	65%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi II %
									Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah II OPD
									Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan II Dokumen
									Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota II Laporan
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik II Laporan

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi II OPD
	5 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	LHE AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Optimalisasi kinerja perencanaan dan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50	89,60	89,70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika II (Angka)
			Nilai	Indeks Kepuasan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika		84,7	85,1	85,8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II Dokumen
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Laporan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II Orang/bulan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD II Dokumen
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan II Orang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor Paket
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran			Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II Unit
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya II Unit
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi II Unit

C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informasi, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik dan tugas pembantuan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 e. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan Tata kelola SPBE dan Smart City}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$	Bidang Tik	Dinas Kominfo
		Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi Yang disampaikan}}{\text{jumlah masyarakat yang disurvei}} \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
2	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$	Bidnag Statistik Dan Persandian	Dinas Kominfo
3	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$	Bidnag Statistik Dan Persandian	Dinas Kominfo

Magetan, September 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760520 199511 1 001

Perubahan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 - 2026

- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informasi, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik dan tugas pembantuan.
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - e. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola SPBE dan Smart City}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100\%$	Laporan monitoring penyelenggaraan SPBE dan Smart City (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi yang disampaikan}}{\text{Jumlah masyarakat yang disurvei}} \times 100\%$	Laporan hasil survey publikasi (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral yang berkualitas}}{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah}} \times 100\%$	Laporan Data Statistik Sektoral (Bidang Statistik dan Persandian)	Kepala Bidang Statistik dan Persandian dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100\%$	Laporan penyelenggaraan keamanan informasi (Bidang Statistik dan Persandian)	Kepala Bidang Statistik dan Persandian dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Magetan, Juli 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir

Tujuan	Sasaran		Satuan	Target	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	80	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan II %	50 %	2.398.298.870	Bidang TIK
					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	15 OPD	1.230.919.183	Bidang TIK
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	15 Unit	1.230.919.183	Bidang TIK
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE II Dokumen	1 Dokumen	1.167.379.687	Bidang TIK
					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota II Dokumen	1 Dokumen	94.663.100	Bidang TIK
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola II unit	1 Unit	473.600.432	Bidang TIK
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan II Unit	50 Unit	490.449.205	Bidang TIK
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart CityII Dokumen	1 Dokumen	48.572.450	Bidang TIK

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu	
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah II Dokumen	2 Dokumen	60.094.500	Bidang TIK	
	2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	%	90	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	90 %	1.020.900.866	Bidang IKP
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media II Berita	1,200 Berita	1.020.900.866	Bidang IKP	
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik II Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	Bidang IKP	
					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah II Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Bidang IKP	
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik II Dokumen	2 Dokumen	64.000.000	Bidang IKP	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik II Dokumen	2 Dokumen	160.000.000	Bidang IKP	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik II Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	Bidang IKP	
					Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media II Layanan	2 Laporan	573.260.716	Bidang IKP	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu	
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya ll Orang	45 Orang	5.000.000	Bidang IKP	
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan ll Komunitas	1 Dokumen	168.640.150	Bidang IKP	
	3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas	%	86	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang di olah dan disajikan ll %	86 %	245.703.508	Bidang SDP
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan ll Dokumen	3 Dokumen	245.703.508	Bidang SDP	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral ll Dokumen	3 Dokumen	175.000.000	Bidang SDP	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS ll orang	27 Orang	70.703.508	Bidang SDP	
	4	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	44	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan Informasi pada Aplikasi ll %	60 %	108.000.000	Bidang SDP
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ll OPD	46 OPD	108.000.000	Bidang SDP	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu	
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan II Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	Bidang SDP	
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota II Laporan	1 Laporan	18.000.000	Bidang SDP	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik II Laporan	1 Laporan	40.000.000	Bidang SDP	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi II OPD	46 OPD	10.000.000	Bidang SDP	
	5 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	89,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika II (Angka)	80 Angka	5.522.171.513	Sekretariat	
			Nilai	84,7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu II Dokumen	14 Dokumen	35.000.000	Sekretariat	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II Dokumen	17 Dokumen	20.000.000	Sekretariat
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Laporan	31 Laporan	15.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	91%	3.687.384.407	Sekretariat
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.686.884.607	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD II Dokumen	1 Dokumen	499.800	Sekretariat
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	40 Orang	35.000.000	Sekretariat
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	40 Orang	35.000.000	Sekretariat
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	12 Paket	450.311.106	Sekretariat
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan II Paket	4 Paket	17.500.000	Sekretariat
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor II Paket	12 Paket	215.386.106	Sekretariat
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan II Paket	2 Paket	15.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan II Paket	3 Paket	35.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan II Paket	3 Paket	19.875.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan II Dokumen	2 Dokumen	4.550.000	Sekretariat
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan	12 Laporan	143.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12 Laporan	1.046.152.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan	12 Laporan	220.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan	4 Laporan	35.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan	12 Laporan	791.152.000	Sekretariat
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	16 Unit	268.324.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II Unit	1 Unit	50.000.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya II Unit	14 Unit	78.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Pengampu
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi II Unit	1 Unit	140.324.000	Sekretariat

E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun dan perubahannya



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314
Tlp/Fax. 0351 - 8197913

Email kominfo@magetan.go.id, website : <https://kominfo.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

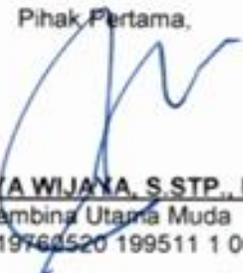
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,


Ir. HERGUNADI, MT.

Pihak Pertama,

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Cakupan tata kelola SPBE dan Smart City	80%
		Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90%
2.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	93%
3.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	85%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.613.712.413	-
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	985.900.866	-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.848.298.970	-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245.703.508	-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	108.000.000	-
JUMLAH		8.801.615.757	

Magetan, 3 Januari 2024

BUPATI MAGETAN



HERGUNADI, MT.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314

Tlp/Fax. 0351 - 8197913

Email kominfo@magetan.go.id , website : <https://kominfo.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 26 Juli 2024

Pihak Kedua.

Ir. HERGUNADI, MT.

Pihak Pertama.

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	80%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	86%
4.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	84,7

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.932.171.413	-
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	985.900.866	-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.848.298.970	-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245.703.508	-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	108.000.000	-

JUMLAH 9.120.074.757

Magetan, 26 Juli 2024


PI. BUPATI MAGETAN
Ir. HERGUNADI. MT.


**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**
CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.SI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760520 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314

Tlp/Fax. 0351 - 8197913

Email kominfo@magetan.go.id website : <https://kominfo.magetan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP. M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL,SE.,M.M

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, November 2024

Pihak Kedua.

NIZHAMUL,SE.,M.M

Pihak Pertama.

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	80%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	86%
4.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	44%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	89,50
			84,7

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.522.171.513	-
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.020.900.866	-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.398.298.870	-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245.703.508	-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	108.000.000	-

JUMLAH 9.295.074.757

Magetan, November 2024

BUPATI MAGETAN



NIZHAMUL, SE., M.M

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

F. Pengukuran Kinerja



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023**

**SATUAN KERJA :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 Magetan Kode Pos 63314
Telp. (0351) 894480 Fax. (0351) 894619

Nomor : 700/ 718 /403.060/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kominfo Tahun 2023.

Magetan, 11 Juli 2024
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan
di
M A G E T A N

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/126/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi AKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan *softcopy* ke alamat: <https://bit.ly/SakipMGT2024> dan pengecekan dokumen yang diupload melalui: <http://esr.menpan.go.id>.
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Google Spreadsheet yang diakses melalui: <https://bit.ly/LKE-AKIP-MGT-2024>.

- c) Tim evaluator juga melaksanakan desk evaluasi dengan wawancara kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Tim Evaluator Internal

Tim evaluator internal AKIP Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan tim gabungan yang terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai AKIP

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3unit kerja baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan menilai terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi AKIP untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27.30	28.75
2	Pengukuran Kinerja	30	26.75	29.00
3	Pelaporan Kinerja	15	11.10	12.28
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21.13	19.38
Nilai Hasil Evaluasi		100	86.28	89.41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A
Interpretasi			Memuaskan	Memuaskan

Uraian penilaian sebagaimana tersebut diatas menyajikan hasil penilaian atas komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

3. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan nilai 89.41 dengan predikat A atau Memuaskan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Laporan Kinerja belum seluruhnya dijadikan informasi dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, dapat dilihat dari ada penentuan target Tahun 2023 lebih rendah dari realisasi tahun 2022;
2. Kurangnya komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target;
3. Laporan Kinerja belum seluruhnya dijadikan informasi dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya, dapat dilihat salah satunya dari indeks kepuasan masyarakat masih dibawah realisasi tahun sebelumnya
4. Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan pada permasalahan dan hambatan yang dituangkan pada evaluasi Rencana Aksi.

B. Rekomendasi

Atas beberapa catatan tersebut di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, Tim Evaluator merekomendasikan saran perbaikan sebagai berikut:

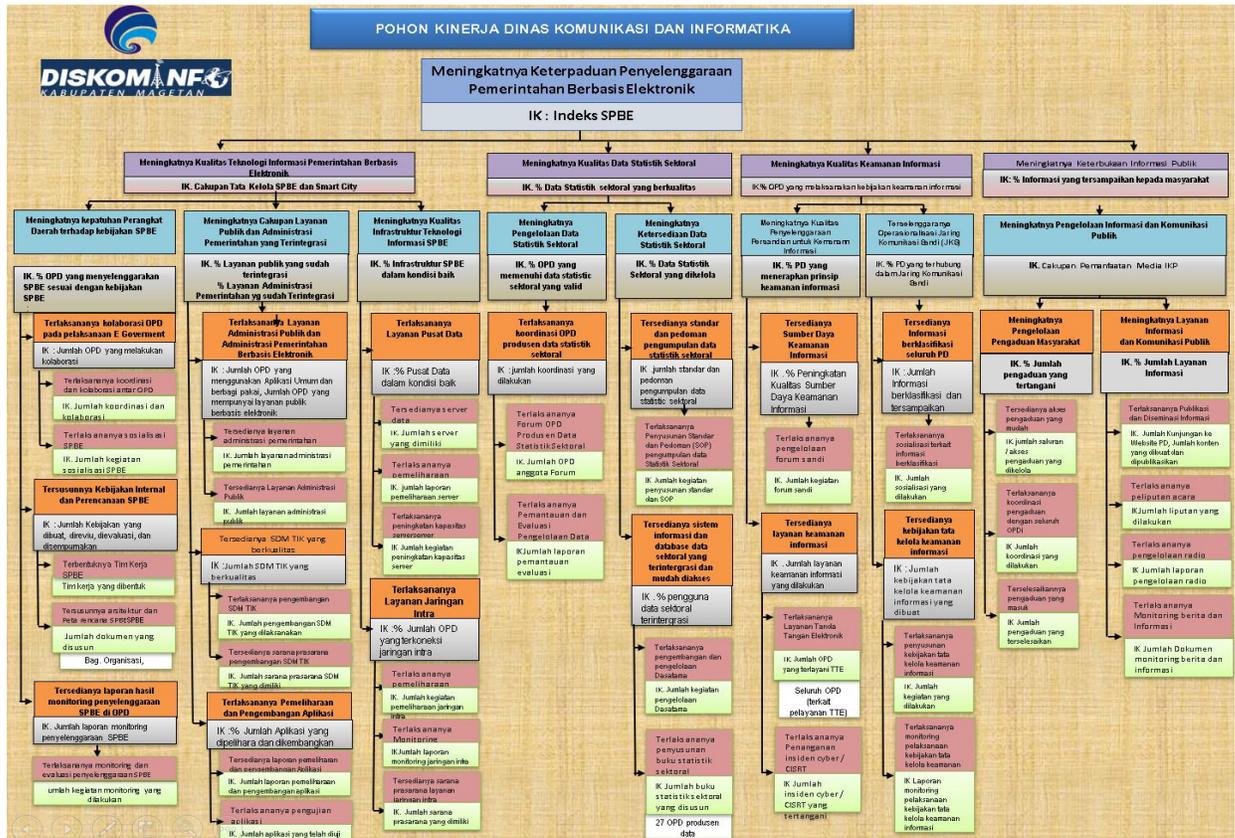
1. Dalam menentukan target agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
2. Agar meningkatkan komitmen dan kinerja sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
3. Dokumen Laporan kinerja dapat dijadikan informasi dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya;
4. Agar kedepan disampaikan langkah-langkah perbaikan atau solusi dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada Dokumen Evaluasi Rencana Aksi.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP ke depannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


a.n. **BUPATI MAGETAN**
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Drs. HERMAWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198602 1 003

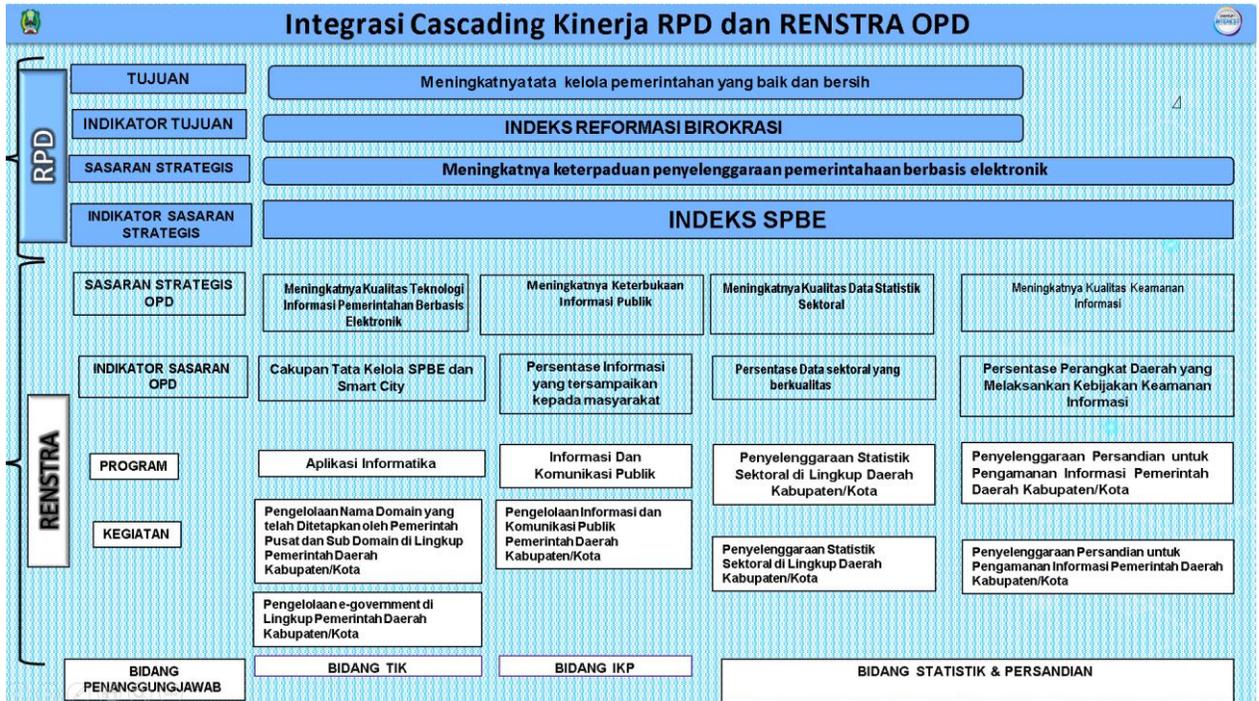
G. Pohon Kinerja



H. Crosscutting



I. Cascading



J. Lain-lain yang dianggap perlu